



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KECAMATAN MUARAGEMBONG KABUPATEN BEKASI

Rika Dinda Lestari ¹⁾, Agustina Setiawan ²⁾, Waluyo Zulfikar³⁾

1,2,3 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Stunting masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data Puskesmas Kecamatan Muaragembong tahun 2024, wilayah ini memiliki angka stunting tertinggi di kabupaten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah kecamatan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat dalam menurunkan angka *stunting* di Kecamatan Muaragembong. Teori yang digunakan adalah tahap-tahap pemberdayaan masyarakat menurut Isbandi Rukmito Adi, meliputi persiapan, assessment, perencanaan, formulasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan dan assessment telah dilakukan cukup baik, namun sarana pemberdayaan belum efektif. Perencanaan program sudah baik, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah. Formulasi rencana aksi berjalan dengan dukungan kader lokal, sedangkan pelaksanaan dan evaluasi belum optimal karena kegiatan tidak rutin dan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi. Terminasi juga belum tercapai karena masyarakat belum mandiri. Hambatan utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan ekonomi, persepsi stunting sebagai faktor genetik, serta jarak pemukiman yang menyulitkan. Upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan antara lain melibatkan RT/RW untuk mengajak warga, mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal bergizi, serta meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kecamatan, *Stunting*.

Abstract

Stunting remains a serious problem in Indonesia, including in Bekasi Regency. According to data from the Muaragembong Subdistrict Health Center in 2024, this area has the highest stunting rate in the regency. This condition indicates that the community empowerment efforts carried out by the subdistrict government have not been optimal. This study aims to determine the form of community empowerment in reducing stunting rates in Muaragembong Subdistrict. The theory used is the stages of community empowerment according to Isbandi Rukmito Adi, which include preparation, assessment, planning, formulation of action plans, implementation, evaluation, and termination. The research method employs a descriptive qualitative

approach with data collection techniques through literature review, observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that preparation and assessment have been carried out adequately, but the means of empowerment are not yet effective. Program planning is good, but community participation remains low. Action plan formulation is supported by local cadres, while implementation and evaluation are not yet optimal due to irregular activities and unmet community needs. Termination has also not been achieved because the community is not yet self-reliant. Major obstacles include low community participation, economic constraints, the perception of stunting as a genetic factor, and the distance of settlements, which makes access difficult. Efforts made by the sub-district government include involving RT/RW to encourage residents, promoting the use of nutritious local food ingredients, and increasing the intensity of education and socialization.

Keywords: *Community Empowerment, Sub-District Government, Stunting*

PENDAHULUAN

Permasalahan *stunting* masih menjadi isu serius di Indonesia karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi *stunting* nasional berada pada angka 21,6%, meskipun menurun dari 24,4% di tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa *stunting* masih menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. *Stunting* tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif, daya saing bangsa, serta produktivitas generasi mendatang. Oleh karena itu, upaya penanggulangan *stunting* membutuhkan intervensi komprehensif yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat secara luas.

Kabupaten Bekasi termasuk salah satu daerah dengan angka *stunting* yang cukup tinggi, terutama di wilayah pesisir seperti Kecamatan Muaragembong. Berdasarkan data Puskesmas Muaragembong tahun 2024, terdapat 81 anak yang mengalami *stunting* atau sebesar 6,1%, menjadikan kecamatan ini sebagai wilayah dengan prevalensi tertinggi di Kabupaten Bekasi. Berbagai faktor turut memengaruhi tingginya angka *stunting* di Muaragembong, mulai dari kondisi geografis yang sulit dijangkau, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, hingga keterbatasan ekonomi keluarga yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan pertanian tradisional. Situasi ini menegaskan pentingnya strategi penanggulangan *stunting* yang lebih adaptif, kontekstual, dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, yang menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah kecamatan dan desa. Kecamatan Muaragembong merespons kebijakan tersebut melalui berbagai program pemberdayaan, seperti *Denting Muger* (Deteksi Dini Stunting Muaragembong Berseri), *Jubah Merah* (Jumat Berkah Minum Tablet Tambah Darah), *Skinkers* (Skrining Kesehatan Calon Pengantin), hingga pelatihan ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat ketahanan gizi keluarga, dan memperluas partisipasi warga dalam upaya penurunan stunting. Namun, meskipun berbagai program telah dijalankan, prevalensi stunting di Muaragembong masih tinggi sehingga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pemberdayaan yang telah dilaksanakan.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran pemerintah kecamatan dalam memberdayakan masyarakat untuk menurunkan angka stunting di Muaragembong. Kurangnya sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat yang membuat program pemberdayaan belum mencapai hasil maksimal. Padahal, konsep pemberdayaan masyarakat menekankan pada keterlibatan aktif warga sebagai subjek pembangunan, sehingga mereka dapat mengenali potensi, meningkatkan kapasitas, dan mengambil keputusan yang berdampak pada kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah sejauh mana pemerintah kecamatan mampu mengimplementasikan strategi pemberdayaan sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat pesisir.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Muaragembong dalam menurunkan angka stunting. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai bentuk, efektivitas, serta tantangan program pemberdayaan yang dijalankan.

Isbandi Adi mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya kontrol individu maupun

kelompok agar mampu mengenali potensi yang dimiliki, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu (1) persiapan, (2) assessment, (3) perencanaan, (4) perumusan rencana aksi, (5) pelaksanaan, (6) evaluasi, dan (7) terminasi. Tahapan tersebut mencerminkan dimensi penting pemberdayaan yang meliputi dimensi pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dimensi keterampilan agar masyarakat memiliki kemampuan praktis, dimensi partisipasi yang menekankan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta dimensi kemandirian yang bertujuan menciptakan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung pada pihak luar (Isbandi, 2008). Dengan demikian, teori pemberdayaan menurut Isbandi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat bergantung pada keterlibatan aktif warga sebagai subjek perubahan sosial yang berdaya (Isbandi, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Muaragembong dalam menurunkan angka stunting. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, meliputi enam informan utama yakni Kepala Kecamatan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kader posyandu, serta masyarakat yang terdiri dari ibu hamil dan orang tua anak stunting (Puskesmas Muaragembong, 2024). Objek penelitian difokuskan pada program-program pemberdayaan masyarakat terkait kesehatan dan ketahanan pangan yang dijalankan di wilayah tersebut.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument), dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan pengumpulan dokumen resmi dari instansi terkait (Sugiyono, 2019). Data primer berasal dari wawancara dan observasi,

sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan puskesmas, peraturan daerah, dan publikasi media lokal terkait program penurunan stunting (PosBekasi, 2024; SiaranBekasi, 2024).

Data yang terkumpul dianalisis dengan model interaktif Miles & Huberman, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber sebagaimana disarankan dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2019). Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dari Isbandi (20013) yang mencakup tujuh tahapan, yakni persiapan, assessment, perencanaan, perumusan rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi. Model statistik tidak digunakan karena penelitian ini berfokus pada pendekatan kualitatif deskriptif.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat dalam menurunkan angka stunting di Kecamatan Muaragembong merupakan suatu proses yang tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai fasilitator, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, proses pemberdayaan di wilayah ini berjalan melalui tujuh tahap sebagaimana dirumuskan oleh Isbandi Rukminto Adi (2008), yaitu persiapan, assessment, perencanaan, formulasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi. Analisis menunjukkan bahwa meskipun tahapan tersebut telah dilakukan, tingkat efektivitas dan kesesuaiannya dengan hipotesis penelitian masih beragam.

Tahap persiapan merupakan dasar dari seluruh proses pemberdayaan. Pemerintah Kecamatan Muaragembong telah menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya kader posyandu, perangkat desa, dan aparatur kecamatan. Mereka diberikan pelatihan tentang gizi seimbang, pola asuh anak, teknik pengukuran tumbuh kembang balita, serta metode penyuluhan yang mudah dipahami masyarakat. Dari data wawancara, para kader menyatakan bahwa pelatihan tersebut membuat mereka lebih percaya diri dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil dan balita. Hal ini sesuai dengan teori Adi (2008) yang

menekankan pentingnya penguatan kapasitas individu sebagai agen perubahan.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pelatihan tidak dilakukan secara berkelanjutan dan hanya diberikan pada momen tertentu. Banyak kader merasa membutuhkan pembaruan ilmu, terutama terkait perkembangan informasi kesehatan terbaru. Ketidakkonsistenan ini berimplikasi pada kurangnya pemerataan pengetahuan antar-kader. Dengan demikian, meskipun hipotesis bahwa persiapan SDM merupakan faktor kunci terbukti, dalam praktiknya masih ada kelemahan dari sisi kontinuitas dan keberlanjutan.

Assessment bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Muaragembong masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai stunting. Sebagian warga masih menganggap stunting sebagai faktor keturunan, bukan akibat gizi buruk atau pola asuh yang kurang tepat. Selain itu, pola hidup bersih dan sehat belum sepenuhnya diterapkan; masih ada masyarakat yang tidak memiliki jamban sehat atau abai terhadap kebersihan lingkungan.

Kendala lain yang ditemukan adalah faktor ekonomi keluarga yang terbatas, sehingga banyak orang tua kesulitan menyediakan makanan bergizi bagi anaknya. Jarak geografis antara pemukiman dengan posyandu atau pusat kegiatan juga menjadi hambatan. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa banyak dari mereka jarang menghadiri kegiatan sosialisasi karena lokasi yang jauh atau karena kesibukan bekerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa hipotesis mengenai perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengkajian masalah belum sepenuhnya terwujud, sebab assessment masih lebih banyak dilakukan oleh pihak pemerintah dan kader, bukan oleh masyarakat secara langsung.

Tahap perencanaan menghasilkan berbagai program inovatif, seperti *Denting Muger* (Gerakan Atasi Stunting Menuju Generasi Ceria), *Jubah Merah* (Jumat Berkah Minum Tablet Tambah Darah), *Jeklin* (Ojek Ibu Bersalin), *Skrinkers* (Skrining Kesehatan Calon Pengantin), serta *Serba Luas* (Sertifikat Bayi Lulus ASI Eksklusif). Program-program ini dirancang melalui musyawarah desa dan kecamatan agar sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Dari segi konsep, ini sudah sejalan dengan prinsip partisipasi sebagaimana ditekankan oleh Adi (2008).

Namun, penelitian menemukan adanya kesenjangan antara perencanaan dengan implementasi. Misalnya, program pelatihan MPASI yang seharusnya dilaksanakan rutin ternyata tidak terlaksana. Demikian pula, sosialisasi yang direncanakan berjalan setiap minggu kenyataannya hanya dilakukan sesekali dan dengan peserta terbatas. Akibatnya, banyak masyarakat tidak merasakan langsung manfaat program. Dengan demikian, hipotesis bahwa perencanaan partisipatif akan menghasilkan program yang efektif terbukti hanya sebagian, karena idealitas program tidak sepenuhnya terealisasi di lapangan.

Formulasi rencana aksi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berusaha mengajak tokoh masyarakat, RT/RW, PKK, dan kader posyandu untuk bekerja sama. Kegiatan penimbangan, penyuluhan, hingga praktik bercocok tanam dilakukan dengan melibatkan warga. Kader posyandu, yang merupakan bagian dari masyarakat, menjadi jembatan penting antara pemerintah dan warga.

Namun, partisipasi masyarakat belum merata. Undangan kegiatan seringkali hanya diberikan kepada perwakilan tertentu, sehingga sebagian besar warga tidak dapat hadir. Fasilitas tempat yang sempit semakin membatasi keterlibatan. Akibatnya, meskipun kolaborasi sudah ada, sifatnya belum inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis mengenai efektivitas kolaborasi dalam pemberdayaan terbukti sebagian, karena tidak semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari pemberdayaan, karena pada tahap inilah program yang sudah direncanakan diimplementasikan. Pemerintah kecamatan telah melaksanakan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi tentang gizi seimbang, penyuluhan pola asuh, pemberian makanan tambahan, pembagian tablet tambah darah, kegiatan posyandu bulanan, hingga kunjungan rumah untuk anak yang berisiko stunting.

Selain itu, ada pula inovasi pangan lokal, seperti nugget daun katuk, yang bertujuan memperkenalkan makanan bergizi dengan bahan sederhana

dan mudah diperoleh masyarakat. Secara teori, pelaksanaan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan berbasis aksi nyata. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tidak konsisten. Sebagian masyarakat mengaku hanya sekali mengikuti sosialisasi, bahkan ada yang tidak pernah mendapatkan undangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tidak konsisten. Sebagian masyarakat mengaku hanya sekali mengikuti sosialisasi, bahkan ada yang tidak pernah mendapatkan undangan. Hal ini menimbulkan kesenjangan akses informasi dan mengurangi efektivitas program. Dengan demikian, hipotesis bahwa tindakan nyata pemerintah akan berdampak langsung pada penurunan stunting belum sepenuhnya terbukti, karena faktor konsistensi dan pemerataan belum terjaga.

Evaluasi dilaksanakan dengan cara pemerintah menanyakan kepada kader mengenai keberhasilan dan kendala program. Dari hasil evaluasi, diketahui adanya peningkatan kesadaran sebagian ibu hamil terhadap gizi, tetapi juga terungkap bahwa masih banyak masyarakat yang tidak hadir di posyandu. Evaluasi ini dianggap masih bersifat internal dan top-down, karena lebih banyak mengandalkan laporan kader daripada umpan balik langsung dari masyarakat.

Padahal, menurut teori pemberdayaan, evaluasi sebaiknya dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat untuk menilai program yang mereka ikuti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan evaluasi yang lebih rutin, terbuka, dan inklusif. Dengan demikian, hipotesis bahwa evaluasi menjadi kunci keberlanjutan program hanya terbukti sebagian, karena bentuk evaluasi yang diterapkan belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Terminasi merupakan tahap akhir yang bertujuan menciptakan kemandirian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah diberi bekal pengetahuan tentang gizi, pola asuh, dan pemanfaatan pekarangan, kemandirian mereka masih lemah. Banyak warga masih menunggu bantuan dari pemerintah, baik berupa makanan tambahan maupun penyuluhan. Masyarakat belum sepenuhnya mampu menerapkan ilmu yang didapat secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, hipotesis bahwa pemberdayaan akan menghasilkan masyarakat yang mandiri dalam mencegah stunting belum terbukti. Kemandirian masyarakat Muaragembong masih dalam tahap berkembang, sehingga proses pemberdayaan harus dilanjutkan dengan strategi pendampingan yang lebih intensif.

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Muaragembong telah membawa dampak positif, terutama dalam peningkatan kapasitas kader, inovasi program, serta tumbuhnya kesadaran sebagian masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena adanya kendala pada konsistensi, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan kemandirian pasca-program. Dengan kata lain, hipotesis penelitian hanya terbukti sebagian: pemberdayaan memang dapat menurunkan angka stunting, tetapi belum optimal.

Hasil ini konsisten dengan pandangan Adi (2008) yang menekankan bahwa pemberdayaan adalah proses panjang yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat, bukan sekadar intervensi pemerintah. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya intensifikasi sosialisasi yang rutin dan merata, penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan program pendampingan ekonomi keluarga, serta evaluasi partisipatif agar masyarakat benar-benar merasa memiliki program. Dengan demikian, tujuan akhir pemberdayaan berupa kemandirian dan penurunan angka stunting secara signifikan dapat tercapai. peningkatan program pendampingan ekonomi keluarga, serta evaluasi partisipatif agar masyarakat dapat benar-benar merasa memiliki program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam menurunkan angka *stunting* di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kecamatan masih belum optimal karena setiap tahapan pemberdayaan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Persiapan hingga terminasi menunjukkan adanya kekuatan, seperti keterlibatan kader masyarakat serta adanya inisiatif edukasi dan sosialisasi, namun kelemahan tetap tampak dari kurangnya efektivitas tempat, rendahnya partisipasi masyarakat, pelaksanaan yang belum rutin, serta evaluasi yang kurang maksimal. Hambatan utama berupa persepsi masyarakat yang masih keliru

tentang stunting dan sikap acuh terhadap pemberdayaan turut memperlambat pencapaian hasil. Meski demikian, upaya pemerintah kecamatan untuk mengatasi hambatan melalui pendekatan langsung dengan melibatkan RT/RW serta terus berusaha memberikan edukasi menjadi langkah positif yang dapat diperkuat ke depan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Muaragembong masih memerlukan konsistensi, inovasi, dan kolaborasi yang lebih intensif agar tujuan menurunkan angka stunting dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annaas Budi Setyawan, R. I. (2018). Promosi Kesehatan Sebagai Usaha Menurunkan Tekanan Darah Penderita Hipertensi. *Jurnal Abdimas PHB*, 1- 6.
- Dasman, H. (2019). Empat dampak stunting bagi anak dan Negara Indonesia. 1-10.
- Dyah dwi astuti, d. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam rangka stop generasi stunting. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 156-162.
- Delwien Esther Jacob, S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat karubaga district sub district tolikara provinsi papua. *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan (JNIK)*, 1-16.
- Dr. Agustina Setiawan, S. M. (2022). *Pemerintah desa (partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa)*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Elvia, U. (2025). Kinerja Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Bekasi. *Ejurnal.undip*, 1-11.
- Fadli Syahputra, d. (2022). Pemberdayaan masyarakat tentang percepatan penurunan stunting di Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. *Jurnal pengabdian aceh*, 247-254.
- Hidayatu Munawaroh, d. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan stunting sejak dini di kecamatan pagedongan kabupaten banjarnegara. *Jurnal pemikiran agama dan pemberdayaan*, 231-242.
- Hidayatullah, F. A. (2019). strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokqal candi plaosan melalui program desa wisata untuk kemandirian ekonomi di desa bugisan kecamatan prambanan kabupaten klaten. *Unnes.ac.id*, 1-86.

- Intan, F. R. (2023). Literasi stunting untuk anak usia dini di TK Melati Terpadu Kabupaten Ogan ilir. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*.
- Irwansyah, D. p. (2020). memahami masyarakat dan perspektif. *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial* .
- Kemenko, S. (2025, MEI 02). *Prevalensi Stunting tahun 2024*. Diambil kembali dari Kemenko.
- Lesamana, I. S. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi program pencegahan stunting di kelurahan bendung kecamatan kasemen kota serang. *Jurnal of Engagement*, 178-187.
- Mambo. (2017). *pemberdayaan kelompok tani sayur di kelurahan kakaskasen II kecamatan tomohon utara*. Tomohon.
- Maulana, R. (2024, Maret 27). *Tekan Stunting, Puskesmas muara gembong luncurkan inovasi Deting Muger*. Diambil kembali dari Bekasiab.go.id.
- nurjayanti, E. d. (2024). pengaruh pengetahuan ibu tentang gizi terhadap kejadian stunting pada balita di puskesmas karangmijo II Tahun 2024.
- PosBekasi. (2024, maret kamis). *Puskesmas muara gembong luncurkan inovasi denting mugeri percepatan penurunan stunting*. Diambil kembali dari Posbekasi.com.
- SiaranBekasi. (2024, November 14). *RSUD Cabangbungin Bersama Puskesmas Muara Gembong Skrining Stunting Di Desa Jayasakti*. Diambil kembali dari SiaranBekasi.
- Sukmana, O. (2024). Pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi dan pemanfaatan potensi lokal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial. *Jurnal madaniya*.
- Teti anggita safitri, d. (2024). Program pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan stunting melalui edukasi, kebin gizi, dan PMT Inovatif di Desa Plumbon. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 1995-2000.
- Unicef, S. (2024, mei 1). *Kenali faktor risiko yang dapat menyebabkan balita mengalami wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk)*. Diambil kembali dari Unicef Indonesia.

Wira. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting pada balita. *Jurnal.stahnmpukuturan*.

Zahra. (2025). Strategi penanganan Stunting pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Bekasi. *uinsgd*.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan Bupati No. 205 tahun 2022 tentang percepatan penurunan *stunting*.